

Implementasi E-Katalog Versi 6 Untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Balai Diklat Keuangan Pontianak

Wilis Aji Sabdono^a

^aPoliteknik STIA LAN Jakarta
e-mail : awilisajisabdono@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu inovasi terkini adalah implementasi e-Katalog versi 6 yang dikembangkan oleh LKPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Katalog versi 6 pada satuan kerja pemerintah dari perspektif administrasi publik, dengan fokus pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pelaku pengadaan yang terlibat dalam proses pengadaan melalui e-Katalog versi 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini bisa mengintegrasikan sistem pengadaan, meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan proses dan penurunan harga melalui fitur negosiasi harga, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas melalui jejak digital. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan SDM, dukungan helpdesk aplikasi yang belum optimal dan keterbatasan jumlah pelaku usaha. Implementasi e-Katalog versi 6 mencerminkan pergeseran menuju tata kelola berbasis digital yang lebih responsif dan akuntabel, serta memperkuat arah reformasi birokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perbaikan sistem pengadaan dan memperluas wawasan teoretis dalam studi administrasi publik digital.

Kata Kunci: e-katalog, efisiensi, transparansi, akuntabilitas.

Implementation of E-Catalog Version 6 to Enhance Efficiency, Transparency, and Accountability at the Pontianak Financial Training Center

Abstract

Digital transformation in the public sector has driven significant changes in the government procurement system. One of the latest innovations is the implementation of E-Catalog Version 6 developed by LKPP. This study aims to analyze the implementation of E-Catalog Version 6 in government work units from a public administration perspective, focusing on the principles of efficiency, transparency, and accountability. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through literature review, direct observation and in-depth interviews of procurement process through E-Catalog Version 6. The findings indicate that this system can integrate procurement processes, improve efficiency through process simplification and cost reduction via the price negotiation feature, and strengthen transparency and accountability through digital records. Nevertheless, challenges remain in the form of limited human resources, suboptimal application helpdesk support, and a limited number of business actors. The implementation of E-Catalog Version 6 reflects a shift toward more responsive and accountable digital governance, while reinforcing the direction of bureaucratic reform in Indonesia. This study provides practical implications for improving procurement systems and expands theoretical insights in the study of digital public administration.

Keywords: E-Catalog, Efficiency, Transparency, Accountability.

A. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dari siklus manajemen keuangan negara yang secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik. Dalam konteks administrasi publik modern, pengadaan bukan hanya soal proses administratif semata, tetapi mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Reformasi dalam sistem pengadaan perlu dilaksanakan secara menyeluruh melalui integrasi aspek hukum, kelembagaan, teknologi, serta budaya birokrasi guna memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan (Syafar & Ramadhan, 2025).

Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara, termasuk Indonesia, mendorong reformasi pengadaan melalui digitalisasi sistem dan prosedur. Salah satu inovasi signifikan adalah sistem e-Katalog, platform elektronik berbasis katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi pengadaan secara cepat, transparan, dan kompetitif. E-katalog adalah platform informasi digital yang dikembangkan untuk menyajikan data terstandarisasi terkait daftar barang dan jasa, mencakup merek, tipe, spesifikasi teknis, harga, serta ketersediaan dari berbagai penyedia, yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan (Rahmawati & Priambodo, 2025). Sistem ini terus mengalami pembaruan, dan versi terbarunya, yaitu e-Katalog versi 6.0.

Salah satu terobosan penting dalam E-Katalog Versi 6 adalah fitur integrasinya secara langsung dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang memperkuat konektivitas antar sistem dalam pengelolaan keuangan negara. Penggunaan metode

pembayaran digital dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat mempercepat pelaksanaan transaksi, memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi penyedia maupun pengguna e-Katalog, serta meminimalkan potensi kesalahan yang sering terjadi dalam sistem pembayaran manual (Rakhman, 2024). Oleh karena itu, E-Katalog Versi 6 berperan tidak hanya sebagai perangkat teknologi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pendekatan New Public Management (NPM) dalam praktik administrasi publik kontemporer (Hood, 1991; Denhardt & Denhardt, 2015).

Konteks birokrasi Indonesia yang masih kental dengan struktur hierarkis dan resistensi terhadap perubahan membuat implementasi inovasi digital seperti e-Katalog versi 6 perlu dianalisis secara mendalam, khususnya di tingkat satuan kerja sebagai pelaksana utama kegiatan pengadaan. Dalam satuan kerja tertentu, penggunaan e-Katalog versi 6 telah dimulai untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional maupun belanja modal, namun belum banyak literatur yang mengkaji bagaimana proses tersebut dijalankan dalam praktik, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana sistem ini berkontribusi terhadap prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Kajian ini menjadi penting mengingat sistem pengadaan yang efektif tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan dan legitimasi pemerintah dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, observasi langsung dan wawancara mendalam, penelitian ini berupaya menggambarkan implementasi e-Katalog versi 6 pada satuan kerja Balai Diklat Keuangan (BDK) Pontianak dari perspektif administrasi

publik, serta menelaah secara kritis dinamika internal dan faktor eksternal yang memengaruhinya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi e-Katalog versi 6 dalam konteks administrasi publik pada satuan kerja pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial yang kompleks dan dinamis, serta memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan proses yang berlangsung di lapangan (Moleong, 2017).

Jenis penelitian ini termasuk dalam studi kasus (*case study*), karena berfokus pada satu unit analisis tertentu, yaitu satuan kerja yang telah menggunakan e-Katalog versi 6 sebagai alat utama dalam pengadaan barang/jasa. Studi kasus memungkinkan pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti (Yin, 2018).

C. PEMBAHASAN

Tabel 1. Paket Pengadaan Menggunakan e-Katalog Versi 6 di BDK Pontianak TA 2025

No	Paket Pengadaan
1	Pengacatan Gedung Kantor
2	Pengecatan Kanopi
3	Pemasangan Dinding Batu Alam
4	Pekerjaan Fisik Pengaspalan Jalan

Sumber : BDK Pontianak (2025).

BDK Pontianak merupakan instansi Pemerintah Pusat di bawah Kementerian Keuangan yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi internal, satuan kerja ini memiliki tingkat aktivitas pengadaan yang cukup tinggi setiap tahunnya,

mencakup belanja operasional rutin, pemeliharaan, non operasional serta pengadaan belanja modal yang mendukung kinerja organisasi. Sejak awal 2025, satuan kerja ini mulai mengimplementasikan e-Katalog versi 6.

Pemanfaatan e-Katalog versi 6 dimulai dari pemilihan penyedia, negosiasi harga, hingga pemesanan barang melalui sistem. Hal ini menandai adanya transisi digital yang cukup signifikan dalam proses bisnis satuan kerja. Dari hasil observasi dan wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) pada BDK Pontianak, dalam implementasi E-Katalog Versi 6 diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Integrasi Sistem Pengadaan dan Pembayaran

Salah satu inovasi paling signifikan dalam E-Katalog Versi 6 adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan sistem keuangan negara, yang mencakup:

- SAKTI, sistem yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah pusat untuk menyusun DIPA, menerbitkan SPM, serta menyusun laporan keuangan;
- SIPD, sistem yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengelolaan keuangan secara komprehensif; dan
- e-Kontrak, sebuah modul baru yang mendukung pembuatan perjanjian elektronik antara penyedia dan pengguna, dilengkapi dengan tanda tangan digital untuk menjamin validitas dan keamanan dokumen.

Informasi dari PPK dan PP BDK Pontianak, interkoneksi E-Katalog Versi 6 dengan SAKTI sudah berjalan dengan baik. Setelah transaksi pengadaan menggunakan E-Katalog Versi 6 masuk ke tahap serah terima pekerjaan, data pengadaan akan terkirim ke aplikasi SAKTI menggunakan menu interkoneksi. Hal ini

dapat meminimalisir perbedaan data antara pengadaan dan pembayaran. Untuk penandatanganan kontrak pada E-Katalog versi 6 menggunakan tanda tangan digital, baik dari sisi PPK maupun dari penyedia barang/jasa.

Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi (OECD, 2021) di mana pengadaan publik perlu dioptimalkan melalui integrasi proses pengadaan ke dalam sistem manajemen keuangan negara, sehingga memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai alokasi anggaran, termasuk beban biaya administratif. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pengadaan, mencegah terjadinya duplikasi, dan mendorong efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa.

2. Penyederhanaan Proses Administratif Pengadaan

Menurut informasi dari PP BDK Pontianak, pertimbangan menggunakan e-katalog versi 6 dalam pengadaan barang/jasa adalah kemudahan dalam proses pengadaan dibandingkan menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya. Sebelum implementasi E-Katalog, proses pengadaan barang/jasa pemerintah umumnya harus melalui tahapan yang panjang dan kompleks. Untuk pengadaan dengan nilai tertentu, pemilihan penyedia dilakukan melalui mekanisme tender atau seleksi. Proses ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Dalam sistem prakualifikasi, evaluasi terhadap kualifikasi penyedia dilakukan terlebih dahulu sebelum mereka mengajukan penawaran, sedangkan pada pascakualifikasi, evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan penilaian atas dokumen penawaran. Tahapan pascakualifikasi meliputi pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, hingga masa sanggah. Sementara itu, proses prakualifikasi cenderung lebih panjang karena melibatkan

tahapan penilaian kualifikasi sebelum penyedia diundang untuk menyampaikan penawaran (Rachman, 2021).

E-Katalog Versi 6 merampingkan alur pengadaan menjadi proses digital yang mencakup:

- Pemilihan barang atau jasa langsung melalui katalog,
- Pelaksanaan e-purchasing yang mencakup pemilihan penyedia dan penyusunan kontrak,
- Proses penerimaan barang, serta
- Integrasi otomatis dengan sistem SAKTI atau SIPD untuk keperluan pencairan dana.

Dengan pendekatan ini, pengadaan menjadi lebih efisien dan terintegrasi antarsistem, yang pada gilirannya mempercepat realisasi anggaran dan mengurangi beban administratif.

3. Penurunan Harga yang mengakibatkan Efisiensi Anggaran

Sebelum berkontrak, PPK atau PP BDK Pontianak melakukan proses negosiasi harga melalui aplikasi E-Katalog Versi 6. Fitur negosiasi pada aplikasi tersebut sudah memadahi untuk melakukan negosiasi seperti fitur chat dengan penjual dan kirim konsep dokumen perhitungan harga negosiasi. Tren negosiasi harga selama ini pada BDK Pontianak bisa menurunkan harga antara 10% s.d. 15% dari harga tayang produk di E-Katalog Versi 6.

Telah diberlakukan kebijakan baru yang memengaruhi struktur biaya dalam transaksi melalui E-Katalog versi 6, yakni pengenaan tarif layanan pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada LKPP. Dalam kebijakan ini, setiap transaksi pengadaan yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk

E-Katalog versi 6, dikenakan PNPB dengan tarif yang bervariasi sesuai dengan nilai kontraknya. Namun, untuk transaksi yang melibatkan penyedia dari kalangan usaha mikro, kecil, dan koperasi, tarif yang dikenakan adalah Rp0,00.

Kebijakan ini merupakan inisiatif pertama dalam sejarah pengadaan nasional yang mengenakan PNPB pada layanan digital pengadaan. Informasi dari PPK dan PP BDK Pontianak, tarif PNPB tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai kontrak antara penyedia dan satuan kerja, melainkan dibebankan pada tahap pembayaran. Dengan demikian, nilai kontrak tetap mencerminkan harga riil barang atau jasa yang diperoleh. Selanjutnya, tarif PNPB yang dikenakan akan langsung disetorkan ke kas negara dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara secara fiskal.

Penerapan PNPB ini juga memperkuat prinsip *value for money*, karena negara memperoleh manfaat ganda berupa efisiensi dari proses pengadaan dan tambahan penerimaan fiskal dari layanan pengadaan digital. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini membawa perubahan struktural dalam skema pembiayaan transaksi pengadaan, penggunaan E-Katalog versi 6 tetap selaras dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, selama pemahaman mengenai mekanisme tarif dan dampaknya terhadap fiskal disampaikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. *Audit Trail* dan Jejak Digital Otomatis

Setiap transaksi yang dilakukan melalui E-Katalog Versi 6 secara otomatis menghasilkan log aktivitas digital yang mencatat informasi penting, seperti: (1) identitas pengguna dan instansinya, (2) waktu serta tanggal pelaksanaan tindakan, (3) jenis perubahan yang dilakukan, seperti revisi pemesanan, dan (4) status terkini dari proses pengadaan beserta pembayarannya. Menurut PP BDK Pontianak, melalui implementasi sistem E-Katalog, seluruh

dokumen seperti kontrak dan berita acara dapat disusun dan diarsipkan secara digital, dan bisa diakses lagi meskipun proses pengadaan di E-Katalog sudah selesai. Mekanisme pencatatan ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi, baik secara internal maupun eksternal, karena menyediakan jejak audit yang berbasis data faktual dan tidak mudah dimanipulasi.

LKPP bersama BPKP melakukan kolaborasi dalam mengidentifikasi empat bentuk anomali yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan melalui Katalog Elektronik. Anomali tersebut mencakup: pertama, pola pembelian berulang terhadap produk dari penyedia yang sama; kedua, terjadinya kenaikan harga secara tiba-tiba yang kemudian turun kembali setelah transaksi dilakukan; ketiga, tingginya kecepatan transaksi pada saat awal suatu produk masuk ke dalam Katalog Elektronik; dan keempat, tercatatnya penyelesaian transaksi dalam kurun waktu kurang dari 60 menit. (LKPP, 2024). Sebagai respons terhadap berbagai anomali yang teridentifikasi, E-Katalog versi 6 dilengkapi dengan fitur e-Audit yang dirancang untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Melalui fitur ini, APIP memperoleh akses terhadap informasi transaksi pengadaan pemerintah yang dilakukan melalui katalog elektronik. Dengan tersedianya dashboard yang menampilkan detail transaksi e-Purchasing, diharapkan APIP dapat melakukan deteksi dini atas potensi penyimpangan dalam proses pengadaan secara lebih cepat dan akurat.

Fitur audit tersebut bisa mengurangi kelemahan pada aplikasi E-Katalog sebelum versi 6. Berdasarkan studi (Ariza, 2024), Sistem E-Katalog Versi 5 masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik koruptif. Kerentanan ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam proses pengadaan.

5. Tantangan penerapan E-Katalog Versi 6

Meskipun penerapan E-Katalog Versi 6 telah menghasilkan berbagai kemajuan signifikan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa di antaranya meliputi:

a. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tantangan utama dalam implementasi E-Katalog Versi 6 adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan sistem tersebut. PPK dan PP pada BDK Pontianak belum pernah mendapat pelatihan tentang penggunaan aplikasi E-Katalog Versi 6, sehingga hampir melakukan kesalahan dalam menjalankan alur aplikasi tersebut. PPK dan PP selama ini hanya belajar alur aplikasi dari membaca manual aplikasi. Kurangnya pelatihan yang komprehensif serta belum meratanya pemahaman mengenai mekanisme kerja E-Katalog Versi 6 berpotensi menurunkan efektivitas pemanfaatannya dalam proses pengadaan.

b. *Helpdesk* aplikasi e-katalog versi 6 belum optimal

Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian dalam implementasi E-Katalog Versi 6 adalah belum optimalnya fungsi layanan *helpdesk* yang disediakan. Dalam praktiknya, BDK Pontianak mengalami kesulitan dalam memperoleh respons cepat dan solutif ketika menghadapi kendala teknis maupun administratif. Respons yang lambat, keterbatasan jam layanan, serta kurangnya petugas yang memiliki pemahaman teknis mendalam terhadap sistem, menjadi hambatan dalam mendukung kelancaran operasional aplikasi. Kondisi ini dapat mengganggu efektivitas proses pengadaan dan mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan manajemen layanan *helpdesk* menjadi salah satu prioritas perbaikan untuk memastikan

keberlanjutan implementasi E-Katalog secara efisien dan responsif. Bila memungkinkan, perlu dibentuk *knowledge management* terkait E-Katalog versi 6. Jika pelaku pengadaan mengalami kendala dalam implementasi E-Katalog Versi 6, maka bisa belajar mandiri dari konten yang ada dalam *knowledge management* tersebut.

c. Jumlah pelaku usaha terbatas

PPK BDK Pontianak menyampaikan permasalahan rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya di sektor konstruksi. Keterbatasan jumlah penyedia yang terdaftar dalam sistem, menyebabkan PPK dan PP mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan penyedia yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Selain itu, minimnya variasi produk dan layanan konstruksi dalam katalog elektronik dari pelaku usaha lokal juga menghambat proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal pencarian referensi harga pasar yang wajar serta memungkinkan untuk dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kondisi ini berpotensi mengurangi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk terlibat dalam belanja pemerintah secara digital. Diperlukan langkah afirmatif dan sosialisasi aktif untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha daerah agar sistem E-Katalog benar-benar inklusif dan mendukung pemerataan ekonomi nasional.

Berdasarkan temuan dan pembahasan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan:

1. Penguatan Kapasitas SDM

Pemerintah, khususnya LKPP sebagai instansi pembina, perlu melakukan pelatihan berkala tentang pemanfaatan fitur dalam e-Katalog versi 6. Pelatihan dilakukan terhadap seluruh pelaku pengadaan yang terlibat dalam E-Katalog Versi 6, termasuk pegawai di unit vertikal Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan proses pembayaran pengadaan.

2. Optimalisasi *helpdesk* aplikasi e-katalog versi 6

Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya layanan *helpdesk* pada aplikasi E-Katalog Versi 6, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di *helpdesk*, baik dari segi jumlah personel maupun kompetensi teknis mereka dalam menangani berbagai permasalahan pengguna. Selain itu, perlu dikembangkan sistem pelaporan dan penanganan tiket yang lebih responsif dan transparan, disertai dengan indikator waktu tanggap (*response time*) yang terukur. Perluasan jam layanan, khususnya di luar jam kerja standar, juga menjadi pertimbangan penting untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna dari berbagai wilayah dengan zona waktu yang berbeda. Integrasi fitur bantuan langsung (*live chat*) dalam sistem E-Katalog serta penyediaan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang mudah diakses akan semakin memperkuat peran *helpdesk* sebagai pendukung utama keberhasilan transformasi digital pengadaan pemerintah.

3. Perluasan partisipasi pelaku usaha

Untuk mendorong peningkatan partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya di sektor konstruksi, dalam E-Katalog Versi 6, diperlukan strategi afirmatif yang terintegrasi antara LKPP, pemerintah daerah, dan asosiasi usaha. Salah satu rekomendasi utama adalah pelaksanaan program pendampingan teknis dan asistensi partisipasi pelaku usaha konstruksi daerah, yang selama ini mengalami kendala administratif dan keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme e-Katalog versi 6. Dengan demikian, E-Katalog tidak hanya menjadi alat efisiensi belanja, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan nasional sekaligus

memperluas pilihan pelaku usaha bagi satuan kerja di daerah.

Untuk pengembangan ke depan, studi ini dapat diperluas ke:

1. Studi komparatif antar satuan kerja yang telah menggunakan e-Katalog versi 6, untuk mengetahui variasi keberhasilan implementasi.
2. Evaluasi kuantitatif dampak efisiensi anggaran dan kinerja belanja, agar diperoleh data numerik yang mendukung narasi kualitatif.

Dengan demikian, E-Katalog Versi 6 diharapkan tidak sekadar berperan sebagai platform pengadaan yang modern, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian ini mengkaji implementasi e-Katalog versi 6 pada satuan kerja instansi pemerintah pusat di daerah dari perspektif administrasi publik, khususnya dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem ini telah membawa sejumlah dampak positif terhadap tata kelola pengadaan barang/jasa, meskipun di sisi lain masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

Pertama, efisiensi proses pengadaan meningkat secara signifikan dengan pemanfaatan fitur negosiasi harga yang mempercepat siklus belanja serta menekan harga pembelian. Kedua, transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui sistem pencatatan digital yang memungkinkan pelacakan dan audit yang lebih objektif. Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan kemampuan SDM, *helpdesk* aplikasi E-Katalog Versi 6 belum optimal dan jumlah pelaku usaha terbatas.

Secara keseluruhan, implementasi e-Katalog versi 6 telah mendukung pencapaian prinsip-prinsip *good governance*, dan mencerminkan semangat reformasi birokrasi digital yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Fokus utama rekomendasi adalah pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi dukungan teknis. Pemerintah, khususnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai instansi pembina, harus secara proaktif melaksanakan pelatihan berkala mengenai pemanfaatan fitur-fitur terbaru dalam aplikasi E-Katalog Versi 6. Pelatihan ini wajib ditujukan kepada seluruh pelaku pengadaan yang terlibat, termasuk pegawai di unit vertikal Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran pengadaan. Diperlukan langkah perbaikan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan layanan *helpdesk* aplikasi E-Katalog Versi 6. Peningkatan kapasitas SDM *helpdesk*, baik dari segi jumlah personel maupun kompetensi teknis, merupakan hal krusial untuk menangani berbagai permasalahan pengguna secara efektif. Selanjutnya adalah perluasan partisipasi pelaku usaha, khususnya sektor konstruksi lokal, dalam E-Katalog Versi 6.

Studi di masa mendatang disarankan untuk diperluas melalui studi komparatif antar satuan kerja yang telah mengimplementasikan E-Katalog Versi 6 untuk memahami variasi keberhasilan implementasi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kuantitatif mengenai dampak efisiensi anggaran dan kinerja belanja, guna mendapatkan data numerik yang kuat sebagai dukungan terhadap narasi kualitatif yang ada.

REFERENSI

Abubakar, R. R. T., Prasetya, D.D. (2025). Penerapan E-Government melalui Aplikasi Masagi Musrenbang di

Desa Ciburial. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 28 (1), 25 – 42.

Ariza, D. (2024). E-Katalog: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4 (1), 20-29.

Budiyanto, S., Nurdin, N., Utomo, T.W.W., Sutrisno, E., Karunia, R.L. (2023). Collaborative Governance Model on The Guidance of Terrorist Parolees (Case Study in Surakarta Parole Office). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8 (2), 214 – 233. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i2.45116>

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (3rd ed.). Routledge.

Handayani, W., Karunia, R. L., & Sutrisno, E. (2023). Penyusunan Tarif PNBP untuk Layanan Reuse dan Recycle Sumber Radioaktif Tertutup Limbah Radioaktif Tidak Terpakai di Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir BRIN. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 29-43. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i1.7597>

Harahap, A.S., Zulvia, P. (2023). Analisis Pengembangan Smart City berdasarkan Dimensi Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Insitutional di Kota Padang Panjang. *Klik: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4 (1), 618 – 624. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1200>

Karunia, R.L., Andrianto, N. (2023). Insight and Oversight Function of BPK to Improve the Management of Indonesian Migrant Workers. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara (JTAKEN)*, 9 (1).

Karunia, R.L., Solihati, K.D., Wati, N.K. (2022). Implementation of Good Governance Principles in the Land Transportation Management Center. *KnE Social Sciences*, 1253–1269.

- Lautza, S., Fitriani, L., Tindaon, S.S., Ravenska, N. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Cidadak Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8 (1), 186-194.
- LKPP. (2024). Siaran Pers Nomor:07/SP-Ses3/03/2024. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nabila, P., Sufianti, E., Nugroho, A.B., Harahap, A.S. (2024). Implementasi Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Di KBM Komersial Kayu Jawa Barat dan Banten Perhutani. *Cakrawala Repositori IMWI*, Vol. 7 No. 5, 1353-1364.
- OECD. (2021). *Public procurement for a resilient future: OECD recommendation on public procurement*. OECD Publishing.
- Pardede, R., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Faktor-faktor Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 242-252. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/36>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang *Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Pradesa, H. A., Agustina, I., & Wijayati, I. Y. (2023). Pelaksanaan Review Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 330-343. <https://doi.org/10.30651/aks.v7i3.13253>
- Rachman, A. (2021). Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar : Materi 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rahmawati, V., & Priambodo, B. (2025). Implementasi E-Katalog Dalam Meningkatkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. *Manajemen Strategis Terkini*, 7 (1), 14-34.
- Rakhman, A.A. (2024). Analisis Pangsa Pasar dan Peluang Pengembangan Katalog Elektronik Pemerintah Versi 6 Dalam Era Transformasi E-Commerce Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3 (2), 69-77.
- Rakhmanita, G. ., Karunia, R. L., & Neneng Sri Rahayu. (2023). Budget Implementation Performance at the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases within the Ministry of Health. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(2), 1042-1053. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v4i3.2542>
- Ramdani, D.F., Abubakar, R.R.T., Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3 (2), 263-269.
- Ravenska, N., Ginanjar, Y.R., Nugroho, A.B., & Nurmalia, E. (2025). Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja: Studi Tentang Pengelolaan Keuangan di RSUP Dr. Hasan Sadikin . *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 6(1), 77-90. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v6i1.1427>
- Rizki, M., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Meningkatkan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara (Literature Review). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 208-219. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/33>
- Rosdiana, D., Karunia, R., & Sutrisno, E. (2024). Management of Operational Assistance Funds (BOS) in State Madrasah Tsanawiyah 15 Jakarta. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 773 -.

- <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5058>
- Ruhiyat, R.F., Pradesa, H.A., Novira, A., Wijayanti, R. (2025). Implementation of the Balanced Scorecard for Performance Evaluation at the West Java Provincial Plantation Service. *Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA)*, Vol. 12, No. 1, 14 – 27. <https://doi.org/10.55963/jumpa.v12i1.729>
- Sabdon, W.A., Kuntadi, C., Karunia, R. L. (2025). e-katalog versi 6 sebagai katalisator integrasi pengadaan dan pembayaran untuk mendorong efisiensi dan transparansi tata kelola keuangan negara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 18 (1), 1 – 10.
- Santika, S., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 266–276. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/38>
- Susiawati, M., Nugraha, H., Priyantor, A. (2025). Bureaucratic Simplification: Changes in Organizational Structure From Structural to Functional in the Central Java Provincial Government. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i1.16764>
- Syafar, I. & Ramadhan, R.A.K. (2025). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (3), 3851-3857.
- Taufik, N.I., Sulistianti, I., Pradesa, H.A. (2022). Penilaian risiko pada layanan pembayaran pensiun PT Asabri Bandung: Sebuah praktek terbaik untuk penguatan tata kelola perusahaan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2), 857-867. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1729>
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEED)*, 5 (1), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijebed.v5i1.1641>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.